

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: UPAYA
PENGENALAN NILAI-NILAI ISLAM YANG UNIVERSAL KEPADA PESERTA
DIDIK MELALUI DUNIA PENDIDIKAN**

Muhammedi

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhah (STIT.AR) Jl. T.A Hamzah Psr 4 Cina
Gg. Melati Tandam Hulu Kec. Hampanan Perak Kab. Deli Serdang.

Email: muham_medi@yahoo.com

Abstract:

Multicultural education is a philosophy that emphasizes the significance, legitimacy and vitality of ethnic and cultural diversity in shaping the lives of individuals, groups and nations. Objectives of Islamic Education is multicultural education that respects and embraces all forms of diversity. Thus it can be expected to grow wisdom in seeing all forms of diversity that exists. Islam is perfect and complete. (Kamil-mutakamil). Therefore all aspects of life would have been discussed and disyari'atkan in it. Example of tolerance, dialogue and consultation, mutual help, silaturrahim, fraternity and others.

Key word: education, multicultural, perspective, Islam

A. Pendahuluan

Wacana pendidikan multikultural sangat penting sebagai salah satu agenda pendidikan masa depan di Indonesia, terutama dalam mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas. Manusia cerdas tidak hanya cerdas dan berkemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga bermoral, bersikap demokrasi, keadilan dan humanisme.

Dengan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Oleh karena itu sebagai upaya mewujudkan prinsip demokrasi, keadilan dan humanisme dalam pendidikan multikultural di Indonesia perlu diperhatikan, *Pertama*, perbedaan agama di Indonesia, yang merupakan fakta keragaman di negeri ini; *Kedua*, multi-etnis dan corak bahasa yang dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa. Keragaman ini dapat menjadi pemicu konflik dalam konteks nasional jika tidak terakomodir dengan baik. Untuk itu peran pendidikan multikultural sangat

menentukan untuk meredam konflik antar etnis; *Ketiga*, perbedaan jenis kelamin dan gender serta status sosial. Pendidikan multikultural dapat mengakomodir perbedaan jenis kelamin dan latar belakang sosial; *Keempat*, perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh orang, baik dilihat secara fisik dan non-fisik.

Pendidikan multikultural dilaksanakan berangkat dari tujuan umum pendidikan yang notabene bukan hanya sebuah transformasi ilmu pengetahuan, melainkan juga proses internalisasi nilai. Selain itu, pada prinsipnya setiap orang memiliki kebebasan dalam hal

pemerolehan ilmu pengetahuan tanpa adanya suatu diskriminasi dan subordinasi suatu golongan tertentu yang mana hal tersebut dapat tercapai dengan pendidikan multikultural.

B. Pengertian Multikultural

Akar kata multikultural berarti banyak budaya. Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan jika menggunakan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang cenderung unik (Mahfud, 2004: 47).

Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai, sekaligus merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan (Mahfud, 2004: 78-79).

Menurut Anshori, secara sederhana memberikan definisi multikultural sebagai “keberagaman budaya”. Selanjutnya beliau menjelaskan, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut-baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda-yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ‘ketidaktunggalan’. Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikultural sebenarnya relatif baru (Anshori, 2010: 134).

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikultural memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikultural menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Oleh karena itu, multikultural sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya (Anshori, 2010: 135).

Kesadaran multikultural secara psikologis merupakan sebuah kecenderungan bahwa setiap manusia dilahirkan keadaannya senantiasa berbeda-beda, baik secara Fisik maupun non fisik. Perbedaan non fisik ini bisa dalam wujud keberagaman sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata cara ritual yang unik (Mahfud, 2004: 78-79).

Sebagai sebuah gerakan, menurut Bhikhu Parekh, sebagaimana dikutip Anshori, baru sekitar 1970-an multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Setelah itu diskursus multikultural berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga dekade sejak digulirkan, multikultural sudah mengalami dua gelombang penting yaitu, pertama multikultural dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*need of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini.

Gelombang kedua, adalah multikultural yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli/masyarakat adat (*indigenous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post- nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat (Tilaar, 2002: 83-84).

Sedangkan menurut Bikhu Parekh, sebagaimana dikutip Anshori, menggarisbawahi tiga asumsi mendasar yang harus diperhatikan dalam kajian tentang multikulturalisme, yaitu: *Pertama*, pada dasarnya manusia akan terikat dengan struktur dan sistem budayanya sendiri dimana dia hidup dan berinteraksi. Keterikatan ini tidak berarti bahwa manusia tidak bisa bersikap kritis terhadap sistem budaya tersebut, akan tetapi mereka dibentuk oleh budayanya dan akan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan budayanya tersebut. *Kedua*, perbedaan budaya merupakan representasi dari sistem nilai dan cara pandang tentang kebaikan yang berbeda pula. Oleh karena itu, suatu budaya merupakan satu entitas yang relatif sekaligus partial dan memerlukan budaya lain untuk memahaminya. Sehingga, tidak satu budaya-pun yang berhak memaksakan budayanya kepada sistem budaya lain. *Ketiga*, pada dasarnya, budaya secara internal merupakan entitas yang plural yang merefleksikan interaksi antar perbedaan tradisi dan untaian cara

pandang. Hal ini tidak berarti menegaskan koherensi dan identitas budaya, akan tetapi budaya pada dasarnya adalah sesuatu yang majemuk, terus berproses dan terbuka (Anshori, 2010: 138).

C. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural.

Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman budaya. Menurut James Banks, sebagaimana dikutip Choirul Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugrah Allah/sunnatullah). Kemudian bagaimana kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan semangat egaliter (Mahfud, 2004: 175-176).

Sejalan dengan pendapat diatas, Muhaemin el Ma'hady, sebagaimana dikutip Choirul Mahfud, berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global) (Mahfud, 2004: 176).

Sedangkan menurut Maslikhah, secara terminologis pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama) (Maslikhah, 20007: 48).

Pendapat yang lebih lengkap tentang pendidikan multikultural dikemukakan oleh M. Ainul Yaqin, bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah (Yaqin, 2005: 25). Lebih lanjut Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multicultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka (Yaqin, 2005: 25).

Dengan kata lain, melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah. Oleh karena itu tujuan pokok dari pendidikan multikultural adalah untuk

menerapkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan sekaligus humanisme. Pendidikan di alam demokrasi seperti Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bangsa yang berlatarbelakang *multi-ethnic, multi-religion, multi-language* dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa penyelenggara pendidikan harus memperhatikan ragam kondisi bangsa yang heterogen.

Dalam pelaksanaannya, James Banks menjelaskan lima dimensi yang harus ada dalam pendidikan multikultural yaitu, *pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komperhensif keragaman yang ada. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antarkeragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultur yaitu agar sekolah menjadi elemen pengentas sosial (transformasi sosial) dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan (Anshori, 2010: 138-139).

Jadi, Pendidikan Multikultural merupakan Model pendidikan yang menawarkan konsep persamaan, menghargai dan menghormati pluralitas dan heterogenitas, menghargai keragaman (budaya, agama, suku, bangsa, etnis).

D. Sejarah Lahirnya Pendidikan Multikultural

Secara historis, pendidikan multikultural sejak lama telah berkembang di Eropa, Amerika dan Negara-negara maju lainnya. Dalam perkembangannya, gerakan pendidikan tentang budaya majemuk (*multicultural education*) mencapai puncaknya pada dekade 1970/1980-an, terutama di lembaga-lembaga pendidikan Amerika Serikat. Di setiap lembaga pendidikan di Amerika Serikat baik di Perguruan Tinggi maupun di lembaga persekolahan prinsip-prinsip kemajemukan etnik dan budaya diusahakan agar diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dalam rangka pembaharuan kurikulum yang menunjang gerakan pendidikan multikultural. Konsep-konsep tentang etnisitas dan nasionalitas dijabarkan kembali dengan tujuan agar gambaran keberadaan jati-diri “etnik seseorang” jelas di mana tempatnya di dalam kebersamaan dan keseluruhan.

Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan. Sebelum Perang Dunia II, boleh dikatakan pendidikan multikultural belum dikenal. Malahan pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*).

H. A. R. Tilaar (2002: 123-127) menegaskan setidaknya ada beberapa kekuatan di dunia yang telah melahirkan pendidikan multikultural, yaitu:

1. Proses Demokratisasi dalam Masyarakat

Satu fenomena penting yang mewarnai transformasi global pada tiga dasawarsa dewasa ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami marginalisasi (Masdar, 1999): 1).

Meskipun demokrasi sesungguhnya merupakan istilah politik, namun terjemahan dan kongkritisasinya tidak hanya ada di dalam kehidupan politik. Dirunut dari akar katanya, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau UU yang berakar pada rakyat. Dengan demikian--dalam terma politik- dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat semua. Sedangkan secara terminologi, paling tidak, ada dua pengertian yang berkembang : (1) *Government by the people exercised either directly or through elected representative*, (2) *A social condition of quality and respect for individual within the community* (Morris, 1979: 351).

Berdasarkan dua perspektif tersebut, kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan politik ada di tangan rakyat. Karena itu, dalam wacana politik modern, didefinisikan sebagaimana apa yang dirumuskan negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Artinya, pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, pemerintahan yang dibangun atas dasar persekutuan antara individu yang banyak dalam menyalurkan hak-hak kedaulatannya, atau pemerintahan politik bangsa yang melibatkan seluruh rakyat (Khalil, 1971: 138).

Seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam sistem kenegaraan membutuhkan demokrasi, karena manusia sebagai hamba Allah butuh dimanusiakan dan dimanusiawikan, sedangkan demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia, suatu sikap hidup insani yang mencerminkan dimiliki dan ditegakkannya peradaban dan kebudayaan (Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, 2001: 89).

Sejalan dengan asumsi tersebut, tuntutan demokrasi tidak hanya terarah pada struktur sosial, politik dan ekonomi, tetapi telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena pendidikan adalah unsur vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat yang demokratis (Alanudi ed, tt: 18). Oleh karena itu dalam masyarakat yang demokratis, diharapkan sistem pendidikannya harus demokratis.

Terlepas dari hal tersebut, dunia yang berkembang dewasa ini berevolusi ke arah sistem yang lebih demokratis, tak terkecuali aspek kependidikan Islam. Demokrasi dalam pandangan ini kiranya telah menjelma sebagai tongkat mukjizat yang diharapkan mampu menempatkan masing-masing unsur yang saling berbeda dan beragam proporsinya di dalam lapisan masyarakat yang majemuk.

Islam dengan ajarannya yang bersifat universal telah mendorong umat manusia untuk melakukan perubahan-perubahan dalam upaya melakukan perbaikan baik secara fisik, mental dan spiritual. Sebagaimana firman Allah swt.

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”* (Q.S. Ar-Ra’d: 11).

Nabi Muhammad saw. baik ketika masih berada di Mekah, maupun setelah hijrah ke Madinah, secara sempurna mewujudkan keteladanan sebagai pendidik utama. Di Mekah misi utama beliau adalah membangun masyarakat yang bertauhid; meletakkan dasar-dasar fundamental bagi pembentukan nucleus masyarakat histories yang viable untuk menjawab tantangan zaman. Sumber bagi pembentukan masyarakat semacam itu adalah ayat-ayat Alquran yang terus turun secara berangsur-angsur yang dilengkapi dengan Sunnah Nabi sendiri (Azra, 1999: 56). Pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat merupakan sebagai konsekuensi logis dari perubahan.

2. Pembangunan Kembali Sesudah Perang Dunia II

Sesudah Perang Dunia II terjadi perubahan besar di dalam tata kehidupan antar bangsa yang ingin membangun kembali puing-puing kehancuran Perang Dunia II di Eropa. Seiring dengan pembangunan kembali Eropa adalah berakhirnya kolonialisme dengan lahirnya negara-negara baru, terutama Afrika. Penduduk eks koloni memasuki Perancis dan Inggris dan menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan di dalam pembangunan kembali negara-negara itu. Migrasi penduduk, khususnya migrasi pekerja, lama-kelamaan meminta perlakuan yang adil terutama bagi generasi mudanya yang menuntut adanya pendidikan yang baik. Migrasi penduduk dunia lebih diintensifkan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi transportasi darat, laut, dan terutama transportasi udara.

3. Lahirnya Paham Nasionalisme Kultural

Dengan munculnya berbagai kelompok bangsa bermukim di negara-negara maju yang semakin pesat, lama kelamaan membentuk sesuatu kekuatan sendiri atau menuntut hak-haknya sebagai “warga negara” yang baru. Dari situ kemudian lahir kelompok-kelompok etnis baru dengan kebudayaannya masing-masing, memberikan warna baru dalam kebudayaan tuan rumah yang sebelumnya sedikit banyak bersifat homogen.

Sejalan dengan perkembangan paham demokrasi dan hak asasi manusia di atas, kelompok-kelompok etnis baru tersebut mulai melebur di dalam etnis *mainstream*. Dengan adanya kelompok-kelompok baru ini, munculah paham nasionalisme baru yang tidak lagi berkonotasi etnis tetapi lebih merupakan pengertian kultural. Di situlah nasionalisme kultural mulai lahir menggantikan nasionalisme etnis, dan pendidikan juga mulai terbuka untuk kebutuhan kelompok-kelompok etnis baru, sekaligus mempersiapkan paradigma baru bagi kelompok mayoritas dengan kebudayaan *mainstreamnya*.

Dari gelombang-gelombang perubahan tersebut di atas itulah yang melahirkan pendidikan multikultural di berbagai negara dengan berbagai coraknya masing-masing. Seperti di Amerika Serikat kita melihat perkembangan pendidikan multikultural yang berawal dari penghapusan segregasi dari kelompok warga negara Amerika yang berasal dari Afrika (*American Afrika*) yang ditantang sangat keras oleh gerakan-gerakan *Civil Rights* yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther King. Gerakan *Civil Rights* ini lebih memacu lagi lahirnya pendidikan multikultural sejak dekade 70-an abad ke-20.

Gerakan demokratisasi pendidikan yang diwujudkan di dalam pendidikan multikultural di Amerika akhirnya juga berimbas di negara tetangganya, Kanada. pendidikan multikultural di Kanada mempunyai wajah yang berlainan karena sejak semula sebagian dari negara Kanada mengenal budaya yang belainan, yaitu budaya Prancis di negara bagian Quebec. Perkembangan pendidikan multikultural di Kanada dengan demikian lebih bersifat progresif dibandingkan dengan negara tetangganya.

Di Jerman dan Inggris, pendidikan multikultural dipacu oleh migrasi penduduk akibat pembangunan kembali Jerman atau migrasi dari eks jajahan Inggris memasuki Inggris Raya. Kebutuhan akan kelompok-kelompok etnis baru ini terhadap pendidikan generasi mudanya telah meminta paradigma baru di dalam pendidikan yang melahirkan pendidikan multikultural.

Kemudian juga di Australia, pendidikan multikultural mendapatkan momentumnya dengan perubahan politik luar negeri Australia. Seperti diketahui Australia merupakan suatu negara yang relatif tertutup bagi kelompok kulit berwarna. *White man policy* yang belum lama ditinggalkan oleh pemerintah Australia telah menyebabkan migrasi dari kelompok-kelompok etnis bukan hanya dari Eropa tetapi juga dari Asia seperti India, Cina, Vietnam, dan juga dari Indonesia.

Dari pengalam negara-negara tersebut di atas yang telah menerapkan praksis pendidikan multikultural kita dapat mengambil manfaatnya sebagai modal dasar penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, meski kita sadari bahwa penerapan pendidikan multikultural di negara-negara tersebut sifatnya lain bila dibandingkan dengan di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di negara-negara tersebut di atas seakan-akan bertentangan dengan budaya homogen, tetapi di Indonesia pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam perspektif pluralitas bangsa Indonesia.

E. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam

Pembumian wacana multikultural pada ranah pendidikan formal (sekolah) dewasa ini semakin menggeliat. Maraknya gagasan multikultural disertai dengan penyebaran isu pendahuluan banyaknya peristiwa bentrokan dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Berbagai pihak kemudian menyuarakan gagasan ini lebih keras dan diimplementasikan lebih dini dalam kurikulum pendidikan.

Lebih jauh lagi, kini, paham multikultural mulai diintegrasikan pada ranah pendidikan agama. Alasannya, seperti dikemukakan dalam buku Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi, Pendidikan Agama Islam yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan dan telah gagal menciptakan harmoni kehidupan dan bahkan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat plural (Ngainun Naim & Achmad Sauqi, 2008: 15).

Dalam kaitannya dengan masalah multikultural, Masdar Hilmy berpandangan bahwa adanya keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan sosial yang sudah menjadi sebuah keniscayaan. Meski demikian, hal itu tidak secara oromatis diiringi dengan penerimaan yang positif pula. Bahkan banyak fakta yang justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Padahal secara psikologis harus diakui bahwa kesadaran multikultural masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat *given*, takdir Tuhan dan bukan faktor bentukan manusia.

Hal ini pernah dibuktikan oleh kenyataan sejarah, bahwa masyarakat Indonesia utamanya Jawa, telah memiliki *track record* yang tidak terlalu jelek dalam pengelolaan sosial budaya. Masyarakat Jawa sangat mudah menggabungkan dua atau lebih sistem nilai yang berbeda, seperti adanya candi Hindu dan Budha yang berdiri saling berdampingan, dan raja-raja Jawa yang disebut sebagai “Siwa Budha” sebagai wujud representasi dialog dua peradaban Hindu Budha (Hilmy, 2003: 332-333).

Selain pandangan di atas, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesadaran multikultural adalah kesiapan mental/psikologis untuk menerima perbedaan sebagai *sunnatullah* (Muchith, 2006: 2). Dengan kesiapan mental tersebut akan timbul kesadaran dalam diri seseorang akan pentingnya hidup bersama dalam keberagaman kultur dan perbedaan agama dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, menghargai perbedaan dan keunikan ke arah terciptanya kedamaian (Baidhawiy, 2005: 85).

1. Indikator Kesadaran Multikultural

Secara sosio kultural, bangsa Indonesia tidak hanya memiliki satu ragam sosial budaya, melainkan juga mempunyai macam sosial budaya yang sangat beragam. Tiap daerah memiliki struktur dan budaya yang cenderung berbeda. Lebih dari 200 juta jiwa dengan 300 suku dan 200 bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara yang multi etnis, multi bahasa, multi ras dan multi agama maupun aliran yang ada di dalamnya.

Multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mempunyai dua sisi potensi yang saling berlawanan. Satu sisi multikultural merupakan kekayaan khazanah budaya yang dapat dibanggakan.

Namun di sisi lain, multikultural ini mempunyai potensi konflik yang disebabkan minimnya kesadaran untuk hidup bersama dalam keadaan penuh kedamaian, kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Karena minimnya kesadaran tersebut, maka sangat mudah terjadi hal-hal yang berbau kekerasan dan kedhaliman, seperti pembunuhan besar-besaran terhadap pengikut Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada bulan Mei tahun 1998 dan perang Islam-Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003.

Peristiwa dan keadaan yang jauh dari rasa kemanusiaan tersebut, mendorong semua umat memiliki kesadaran multikultural yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan beragama.

Sedang kesadaran multikultural dapat digambarkan melalui berbagai karakteristik sebagai berikut: (a) memiliki kesadaran untuk belajar hidup dalam berbagai perbedaan, (b) kesadaran untuk saling percaya, (c) kesadaran untuk saling menghargai, (d) berpikiran terbuka, (e) kesadaran ke arah resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan (Masyharuddin, 2006: 22).

Kesadaran untuk belajar hidup dalam perbedaan, maksudnya adalah sikap toleransi dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan, pendapat dan keyakinan. Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin untuk belajar hidup bersama orang lain yang berbeda dalam berbagai hal.

Sedang yang dimaksud kesadaran untuk saling percaya adalah rasa saling menjauhkan diri dari buruk sangka dalam rangka penguatan kultural. Sementara mengenai kesadaran saling menghargai maksudnya adalah sikap mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada superioritas maupun inferioritas, karena saling menghargai sesama manusia merupakan nilai universalitas semua agama.

Adapun yang dimaksud berpikiran terbuka adalah kematangan berfikir terhadap objek tertentu, dengan membuka diri terhadap masukan pihak lain yang lebih konstruktif.

Selanjutnya mengenai kesadaran resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan maksudnya adalah suatu sikap yang tulus dengan mengikutsertakan ajaran agama sebagai solusi penyelesaian konflik ke arah rekonsiliasi tanpa menggunakan kekerasan dan kedhaliman.

Dalam pandangan lain disebutkan bahwa indikator kesadaran multikultural meliputi: (1) memiliki kesadaran untuk mengapresiasi terhadap kenyataan pluralisme budaya dalam masyarakat, (2) kesadaran untuk mengakui terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasinya, (3) memiliki kesadaran untuk mengembangkan tanggungjawab manusia terhadap planet bumi (Tilaar, 2003: 1701-72).

2. Pendidikan Multikultural Perspektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. (*kamil-mutakamil*). Oleh karena itu semua aspek kehidupan pasti sudah dibicarakan dan disyariatkan di dalamnya. Hal ini tercantum dalam firman Allah swt.

Artinya: *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (QS: Al-Maidah: 3).

Dalam rangka untuk merealisasikan hal tersebut, menurut Suparta (2008: 55-71), Islam telah memberikan beberapa konsepsi hidup bermasyarakat yang riil. Diantara konsep itu di antaranya adalah:

a. Toleransi

Secara etimologis, kata toleransi berasal dari bahasa Belanda *tolerantie* yang kata kerjanya adalah *toleran* yang berarti menahan diri, sabar, membiarkan orang lain, dan berhati lapang terhadap pendapat yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran mengandung pengertian : bersikap menghargai pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13:

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

b. Dialog dan Musyawarah

Dialog merupakan pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk saling belajar agar dapat berubah, tumbuh dan berkembang. Islam memandang hal ini dalam Firman Allah swt

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”* (Q.S, Ali ‘Imran/3:159)

Allah swt. berfirman dalam Al Qur'an Surat Ali Imran: 64

Artinya: *“Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran : 64)*

c. Tolong Menolong

Keberbedaan harus disikapi secara arif dan bijaksana. Jika perbedaan itu ditata dengan baik dan teratur maka akan menghasilkan sebuah peradaban yang kokoh dan tangguh.

d. Silaturahmi

Silaturahmi adalah menyambung tali kekeluargaan dan kekerabatan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas: *“Barang siapa yang ingin dibukakan (diluaskan) rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah”*. Dalam hadits lain, Tirmidzi menyebutkan: *“Sesungguhnya silaturahmi itu (menimbulkan) kecintaan bagi keluarga, menumbuhkembangkan harta, dan menambah umur”*.

e. Persaudaraan

Rasulullah mengajarkan konsep persaudaraan sejak pertama kali menyebarkan agama Islam. Perselisihan dan pertikaian yang ada menjadi luluh dengan adanya ajaran persaudaraan, misalnya ketika menyatukan kelompok muhajirin dan anshor.

Walaupun Islam dengan tegas memberikan konsep-konsep multikultural, namun sampai dengan saat ini masih terjadi pro dan kontra mengenai masalah tersebut. Sebagian berpendapat bahwa konsep pendidikan multikultural, mereka berpendapat bahwa hal ini hanya akan menimbulkan pencemaran dan pengrusakan keyakinan bagi umat Islam. Sementara pihak lain beranggapan bahwa meskipun wacana pendidikan multikultural berasal dari Barat, tapi jika dikaji secara mendalam ternyata Islam telah memberikan isyarat tentang konsep pendidikan multikultural. Suparta (2008: 55-71) menyatakan beberapa landasan itu antara lain:

- 1) Aspek kesatuan ketuhanan, pendidikan Islam mendasarkan pandangannya dari Al-Quran Surat An-Nisa: 131.

Artinya: *“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji*

- 2) Aspek kesatuan kenabian didasarkan dari Al-Quran Surat al-Anbiya' ayat 73.

Artinya: *“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”*

- 3) Kebebasan memeluk agama didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 256.

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

- 4) Pengakuan agama lain selain Islam didasarkan pada Al-Quran surat al-Maidah ayat 69.

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*

Semua ayat tersebut dipahami dalam perspektif teologis-normatif, yaitu dengan pengertian, didalamnya tidak ada keraguan sedikitpun dan bersifat mutlak. Pemahaman dari ayat-ayat tersebut tetap diletakkan dalam konteksnya sebagai yang mutlak. Karena bersifat mutlak, maka cara kerja yang ditempuh seorang guru agama harus selalu berusaha mengkaji ulang untuk membuktikan substansi kebenarannya (Anshori, 2010: 161).

Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural bukan hanya secara konseptual memberikan kesamaan hak atas peserta didik dalam kelas untuk mendapatkan kesempatan di bidang apa saja, melainkan juga menjelaskan kepada siswa bagaimana Islam membina hubungan yang baik dengan penganut tradisi di luar Islam yang pernah di bawa Nabi Muhammad saw. beberapa abad silam. Pendidikan Islam multikultural seyogyanya menjadikan dasar-dasar normatif ini sebagai landasan untuk merumuskan bagaimana semestinya proses pendidikan dalam Islam dikelola sehingga ia tidak asing dari masyarakat yang secara hukum alam punya budaya sendiri-sendiri.

Dalam konteks relasi masyarakat yang kompleks, pluralisme merupakan kunci penting untuk memahami realitas kehidupan. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi, karena itu tidak mungkin ada realitas tunggal, tetapi plural. Sebab, setiap individu dan komunitas sosial memiliki konstruksi sosial sendiri-sendiri (Ngainun Naim & Ahmad Syaqui, 2008: 76).

Dengan demikian, Islam telah mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan kepada seluruh kaum muslimin, baik pria maupun wanita sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar adanya pendidikan seumur hidup.

F. Penutup

Pendidikan Multikultural adalah Proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan Multikultural merupakan Model pendidikan yang menawarkan konsep persamaan, menghargai dan menghormati pluralitas dan heterogenitas, menghargai keragaman (budaya, agama, suku, bangsa, etnis).

Pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa gerakan hak-hak sipil yang terjadi pada 1960-an di Amerika. Gerakan ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik kehidupan yang diskriminatif, baik di tempat-tempat publik di rumah-rumah, di tempat-tempat kerja, maupun dilembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara musyawarah. Agama Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi (umum) ataupun ilmu ukhrawi (agama).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Arifin, Syamsul dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001).
- Alanudi, Abdullah (ed.), *Apakah Demokrasi itu*, terj. Budi Prayitno (tt:tp, tt).
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Hilmy, Masdar. "Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme", *Journal Ulumuna*, VII, 12 Juli-Desember, 2003.
- Khalil, Muhsin, *al-Nazm al-Siyasiyah wa al-Qanun al-Dusturiyah* (Iskandariyah: Al-Ma'arif, 1971).
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Morris, William (ed.), *Dictionary of English Language* (New York: Hoghton Mifflin Company, 1979).
- Masyharuddin, "Mendesain Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural", *Journal Addin*, Vol. I, No. 2, Juli-Desember, 2006.

- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural*, Salahtiga: JP Books, 2007.
- Muchith, M. Saekhan. “Pembelajaran Berbasis Multikultural”, *Journal Addin*, Vol. I, No. 2 Juli-Desember 2006.
- Naim, Ngainun & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008.
- Suparta, Mundzier. *Islamic multicultural Education* , Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Tilaar, H. A. R., *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- _____, *Kekuasaan dan Pendidikan suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, Magelang: Indesia Tera, 2003.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta:Pilar Media, 2005.